

# **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013-2016**

Oleh:

**Suheni Tri Puji Handayani**

**153300547**

Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa

Kebumen

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Kebumen tahun 2013-2016 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisien, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan metode data sekunder yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kebumen dilihat dari rasio efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Kabupaten Kebumen telah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu sebesar 119,43%. Rasio keuangan daerah sudah efisien karena rata-rata di bawah 100% yaitu 91,78%. Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong sangat rendah dan pola hubungannya instruktif karena rasio tersebut masih di bawah 25% dengan tingkat kemandirian rata-rata sebesar 11,78%. Rasio belanja operasi daerah rata-rata masih sangat tinggi yaitu 74,19%, sementara belanja modal rata-rata 23,61%; sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Rasio pertumbuhannya masih mengalami fluktuasi pendapatan pada periode 2013-2016 dengan hasil perhitungan rata-rata realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 33,13%, realisasi penerimaan pendapatan rata-rata sebesar 15,91%, dan realisasi belanja pembangunan adalah 24%,7%.

Kata kunci: otonomi daerah, kinerja keuangan daerah, analisis rasio keuangan.

**Abstract:** *This study aims to determine the financial performance of Kebumen Regency in 2013-2016 seen from the regional financial independence ratio, effectiveness ratio of original local government revenue (PAD), efficient ratio, harmony ratio, and growth ratio. This study uses quantitative data and data collection used is secondary data methods taken from Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kebumen Regency. The results of this study indicate that the financial performance of the Kebumen Regency BPKAD seen from PAD ratio effectiveness on the financial performance of Kebumen Regency has been effective because the average effectiveness is above 100% that is equal to 119.43%. Regional financial ratio is efficient because the average is below 100%, which is 91.78%. The regional financial independence ratio is classified as very low and relationships pattern is instructive because the ratio is still below 25% with an average level of independence of 11.78%. Regional operating expenditure ratio is still very high, namely 7.19%, while capital expenditure average is 23.61%; so it can be concluded that local government still prioritizes operating expenditures compared to capital expenditure. Growth ratio still experiences income fluctuations in the period of 2013-2016 with the results of the calculation of the average PAD realization of Kebumen Regency Government which is 33.13%, the realization of the average income revenue of 15.91%, and the realization of the development expenditure is 24%.7%.*

**Keywords:** *regional autonomy, local financial performance, financial ratio analysis.*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai Undang–Undang yang mengatur Otonomi Daerah, dan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisaasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah Pelaksanan desentralisasi yaitu berupa penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi terletak pada kemampuan mengelola keuangan daerah, artinya otonom daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai persyaratan mendasar sistem pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diterapkannya standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya, karena itu pemerintah Kabupaten Kabumen sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk diniali apakah Pemerintah Kabupaten Kabumen berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabumen selama empat tahun terakhir (Tahun 2013-2016) dengan menggunakan analisis rasio efektifitas, rasio efisien, rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen selama empat tahun terakhir (Tahun 2013-2016) dengan menggunakan analisis rasio efektifitas, rasio efisien, rasio kemadirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### ▪ Otonomi Daerah

Menurut Halim (2013:01) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah, sehingga undang–undang tersebut sering disebut dengan Undang–Undang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan perundang–undang yang berlaku.

### ▪ Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

### ▪ Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2010:157) Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasara, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategi Planning* suatu organisasi.

### ▪ Kemandirian Keuangan

Menurut Halim (2008:232) Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

### ▪ Jenis Data

Jenis yang digunakan data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang dapat diukur dan dapat dilakukan perhitungan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data yang telah ada dari dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Kabumen

terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2013-2016 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen (BPKAD).

- **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data, data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian keuangan yang berupa data Laporan Raelisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kabumen. Dari hasil Laporan Realisasi Anggaran tersebut nantinya akan diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kabumen tahun 2013–2016.

- **Metode Analisis data**

### **Rasio Efektifitas**

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

#### **Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah**

<b>Kriteria Efektifitas</b>	<b>Presentase Efektifitas (%)</b>
Tidak Efektif	X<100%
Efektifitas Berimbang	X=100%
Efektif	X>100%

Sumber: Mahsun (2006) dalam Puspitasari (2013:04)

### **Rasio Efisien**

Rasio ini menggambarkan perbandingan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan (penerimaan) yang diterima.

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### **Tabel II.2. Kriteria Efisien Keuangan**

<b>Kriteria Efisien</b>	<b>Presentase Efisien (%)</b>
Tidak Efisien	X>100%
Efisien Berimbang	X=100%
Efisien	X<100%

Sumber : Mahsun (2006) dalam Puspitasari (2013:05)

### Rasio Kemandirian

Menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

### Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 70%	Partisipatif
Tinggi	70% - 100%	Delegatif

Sumber: Hermi Oppier dalam Pramita (2015:19)

### Rasio Kekeragaman

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja Pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012:L-8). Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu:

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

Belum ada standar yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan

### Rasio Pertumbuhan

Menurut Puspitasari (2014:05) rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Rasio Penerimaan PAD=	$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } X_{n-1}}$
Rasio Pertumbuhan $\sum$ Pendapatan=	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan } \sum \text{Pendapatan } X_{n-1}}$
Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan=	$\frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan PAD } X_{n-1}}$

Keterangan:

$X_n$  = Tahun yang dihitung

$X_{n-1}$  = Tahun sebelumnya

#### 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- **Rasio efektifitas**

Rasio Efektivitas PAD BPKAD Kabupaten Kebumen  
Tahun Anggaran 2013-2016

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2013	131.481.736.502	116.720.489.000	112,64	Sangat Efektif
2014	242.079.502.075	163.586.346.000	147,98	Sangat Efektif
2015	245.159.255.421	221.657.039.000	110,60	Sangat Efektif
2016	291.016.321.703	273.228.579.000	106,51	Sangat Efektif

Sumber: Diolah Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kebumen

Berdasarkan perhitungan bahwa pada tahun 2013 sebesar 112,65% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2014 mengalami kenaikan yang drastis sebesar 35,33% menjadi 147,98% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 37,38% menjadi 110,60% dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar 4,09% menjadi 106,51% dengan kriteria sangat efektif. Efektifitas kinerja keuangan Kabupaten Kebumen untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sudah sangat efektif karena nilai prosentase yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang drastis disebabkan pendapatan asli daerah pada pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 43.343.968.696 naik sebesar Rp 18.801.882.523 dari tahun 2013 sebesar Rp 24.542.086.173,-

Pendapatan asli daerah yang direalisasikan tahun 2013 sebesar Rp. 14.761.247.502 lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang

ditargetkan, tahun 2014 pendapatan asli daerah yang direalisasikan sebesar Rp. 78.493.156.075 lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang ditargetkan, tahun 2015 pendapatan asli daerah yang direalisasikan sebesar Rp. 23.502.216.421 lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan, dan tahun 2016 pendapatan asli daerah yang direalisasikan sebesar Rp. 17.787.742.703 lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah mampu secara maksimal untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektifitas PAD tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Efektifitas kinerja keuangan sudah sangat efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena rata-rata rasio efektifitas diatas 100% yaitu 119,43%. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah yang terealisasikan melebihi dari yang ditargetkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada.

- **Rasio Efisien**

Hasil Perhitungan Rasio Efisien Keuangan Daerah  
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2016

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>REPAD (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2013	1.548.176.706.140	1.626.530.654.021	95,18	Efisien
2014	1.906.501.957.288	1.967.047.779.137	96,92	Efisien
2015	2.033.106.110.204	2.326.188.256.641	87,40	Efisien
2016	2.283.531.796.631	2.326.188.256.641	87,62	Efisien

Sumber: Diolah Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kebumen

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisien keuangan daerah diketahui realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2013 sampai dengan 2016 rata-rata mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pada tahun 2013 sebesar Rp 1.626.530.654.021, naik menjadi Rp 1.967.047.779.137 pada tahun 2014. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 menjadi Rp 2.326.188.256.641, dan pada tahun 2016 naik lagi menjadi Rp 2.326.188.256.641.

Total belanja daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2013 sampai dengan 2016 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun 2013 total belanja daerah sebesar Rp 1.548.176.706.140, naik menjadi Rp 1.906.501.957.288 pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 2.033.106.110.204. Pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 2.283.531.796.631.

Berdasarkan Perhitungan pada rasio efisien keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisien keuangan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2013 sampai dengan 2016 sebesar 91,78% atau dapat dikatakan efisien. Pada tahun 2013 sebesar 95,18% dengan kriteria efisien, tahun 2014 naik sebesar 1,75% menjadi 96,92% dengan kriteria efisien, tahun 2015 turun sebesar 9,52% menjadi 87,40% dengan kriteria efisien, dan tahun 2016 naik sebesar 0,22% menjadi 87,62% dengan kriteria efisien.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada rasio efisien keuangan daerah tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen efisien kinerja keuangan daerah sudah tergolong efisien dalam mengelola keuangan daerahnya karena rata-rata rasio efisien dibawah 100% yaitu 91,78%. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah yang terealisasikan melebihi dari yang ditargetkan yang sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan pendapatan daerah yang telah direncanakan, hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kebumen bisa menekan jumlah belanja daerahnya dan mampu menyeimbangkan pendapatan dengan belanja daerahnya dengan baik.

- **Rasio Kemandirian**

Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian BPKAD  
Kabupaten Kabumen Tahun 2013-2016

Tahun	PAD (Rp)	Transfer (Rp)	RKK (%)	Pola hubungan
2013	131.481.736.502,00	1.405.048.917.519,00	8,7	Instruktif
2014	242.079.502.075,00	1.723.930.277.062,00	14,04	Instruktif
2015	245.159.255.421,00	2.059.880.470.220,00	11,9	Instruktif
2016	291.016.321.703,00	2.312.163.281.331,00	12,5	Instruktif

Sumber: Diolah Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kabumen

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas kemampuan keuangan Kabupaten Kebumen Terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Berawal pada tahun 2013 rasio kemandirian sebesar 8,7%, kemudian naik menjadi 14,04% Pada tahun 2014. Pada tahun 2015 kemandirian sebesar 11,9%, kemudian naik kembali menjadi 12,5% pada tahun 2016. Jika dilihat dari tahun ke tahun pola kemandirian keuangannya masih tergolong rendah sekali dengan pola hubungan instruktif karena masih tergolong dalam interval 0%-25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun ke tahun pola kemandiran keuangan masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instrukti, yaitu pemerintah pusat dominan daripada pemerintah daerahnya, ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0%-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kebumen dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan Kabupaten Kebumen secara keseluruhan dapat dikatakan masih sangat rendah, hal ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari pusat masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembanguan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah, retribusi daerah yang merupakan komponen PAD masih rendah, juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Kebumen sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Sehingga ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan propinsi masih tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, pendapatan

pajak daerah dimana pada tahun 2015 sebesar Rp.52.015.233.621 naik ditahun 2016 menjadi Rp.62.838.508.061. Kemudian pada sisi Retribusi Daerah ditahun 2013 sebesar Rp.24.542.086.173 naik ditahun 2014 menjadi Rp.43.343.968.696. Pada sisi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan pada tahun 2013 Rp.5.506.191.030 naik ditahun 2014 menjadi Rp.8.008.929.340. Pada sisi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2015 Rp.157.685.731.927 naik ditahun 2016 menjadi Rp.195.849.594.073

- **Rasio Keserasian**

Hasil Perhitungan Rasio Keserasian BPKAD Kabupaten Kabumen  
Tahun 2013-2016

Tahun	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Realiasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)	Rasio Belanja Modal (%)
2013	1.548.176.706.140	1.191.647.569.927	286.958.914.202	76,97	18,53
2014	1.906.501.957.288	1.360.390.964.103	465.778.357.808	71,35	24,43
2015	2.033.106.110.204	1.564.935.277.492	468.153.450.416	76,97	23,02
2016	2.283.531.796.631	1.632.755.658.513	649.703.102.744	71,50	28,45

Sumber: Diolah Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kabumen

Berdasarkan perhitungan pada rasio keserasian dapat diketahui bahwa realisasi Total Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2013 sampai dengan 2016 selalu mengalami kenaikan. Berawal pada tahun 2013 total belanja daerah sebesar Rp1.548.176.170.140. Mengalami kenaikan menjadi Rp 1.906.501.957.288 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 total belanja daerah sebesar Rp 2.033.106.110.204 naik lagi dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 2.283.531.796.631.

Total Realisasi Belanja Oparasi daerah yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Masing-masing sebesar: Rp 1.191.647.569.927, Rp 1.360.390.964.103, Rp 1.564.935.277.492, dan Rp 1.632.755.658.513. Total Realisasi Belanja Modal daerah yang terdiri atas: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai dengan 2016.

Masing-masing sebesar: Rp 286.958.914.202, Rp 465.778.357.808, Rp 468.153.450.416, Rp 649.703.102.744.

Berdasarkan perhitungan bahwa Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa Belanja Operasi dan Belanja Modal masih belum stabil dari tahun ke tahun. Belanja Modal pada tahun 2013 dimana rasio nya sebesar 18,53% mengalami peningkatan sebesar 5,9% pada tahun 2014 menjadi sebesar 24,43%, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,41% menjadi sebesar 23,02%, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali sebesar 5,43% menjadi sebesar 28,45%. Pada Rasio Belanja Operasi pada tahun 2013 yang mana rasionya sebesar 76,97% menurun sebesar 5,65% pada tahun 2014 menjadi sebesar 71,35%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali sebesar 5,65% menjadi sebesar 76,97%, tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar 5,47% menjadi sebesar 71,50%.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Berdasarkan hal ini disebabkan rasio keserasian belanja operasi dengan belanja modal sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Kebumen masih memprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi dibandingkan memprioritaskan belanja modal. Terlihat dari rata-rata rasio keserasian antara belanja operasi dengan belanja modal angkanya selalu lebih besar daripada belanja modal.

Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada standar yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu

kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh public, Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

- **Rasio Pertumbuhan**

Perhitungan Rasio Pertumbuhan pada Pemerintahan  
Kabupaten Kebumen Tahun 2013-2016

Tahun	Rasio Pertumbuhan berdasarkan Realisasi PAD	Rasio Pertumbuhan berdasarkan Realisasi Penerimaan $\Sigma$ Pendapatan	Rasio Pertumbuhan berdasarkan Realisasi Belanja Pembangunan
2013	28,43%	12,43%	-2,79%
2014	84,12%	20,94%	62,32%
2015	1,27%	18,25%	0,50%
2016	18,70%	12,03%	38,77%

Sumber: Diolah Dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kebumen

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PAD mengalami fluktuatif. Mengalami pertumbuhan realisasi PAD paling tinggi pada tahun 2014 sebesar 84,12% dengan rata-rata 33,14%. Pendapatan daerah juga mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,91%. Belanja pembangunan rata-rata pertumbuhannya sebesar 24,7%.

Dari hasil perhitungan diatas menggambarkan bahwa rasio pertumbuhan berdasarkan realisasi PAD pada Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2013 sebesar 28,43%, tahun 2014 naik sebesar 55,69% menjadi 84,12%, tahun 2015 mengalami penurunan yang drastis sebesar 82,85% menjadi 1,27%, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 17,43% menjadi 18,70%. Hasil perhitungan diatas dapat dilihat realisasi pendapatan asli daerah belum mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama periode 2013-2016, terbukti 2015 mengalami penurunan, penurunan tersebut disebabkan karena dipengaruhi oleh pendapatan retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sedangkan tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup drastis pada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi pajak, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Untuk rasio pertumbuhan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan pada pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2013 sebesar 12,43%, tahun 2014 naik sebesar 8,51% menjadi 20,94%, tahun 2015 turun sebesar 2,69% menjadi 18,25%, dan pada tahun 2016 turun sebesar 6,22% menjadi 12,03%. Dari sisi realisasi penerimaan pendapatan mengalami penurunan dan kenaikan, penurunan tersebut dialami pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari Rp.1.038.000.000,- menjadi Rp. 21.148.531.000,- disebabkan karena pada pos Lain-lain Pendapatan yang Sah seperti pendapatan hibah, dan tahun 2016 mengalami penurunan drastis dari Rp.21.148.531.000,- menjadi Rp.3.030.221.000,- disebabkan pada pendapatan hibah.

Rasio pertumbuhan berdasarkan realisasi belanja pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2013 sebesar -2,79%, tahun 2014 naik drastis sebesar 59,53% menjadi 62,32%, tahun 2015 turun drastis sebesar 61,82%, menjadi 0,50%, dan pada tahun 2016 naik cukup drastis sebesar 38,27% menjadi 38,77%. Hal ini disebabkan realisasi belanja pembangunan mengalami penurunan dan kenaikan, terbukti pada tahun 2013 mengalami penurunan pada belanja tanah, belanja bangunan dan gedung dan belanja aset tetap lainnya, tahun 2014 mengalami kenaikan yang drastis pada belanja tanah, belanja bangunan dan golongan serta belanja tanah, irigasi dan jaringan, tahun 2015 turun disebabkan turunnya belanja gedung dan bangunan dan belanja jalan irigasi dan jaringan, sedangkan tahun 2016 mengalami kenaikan kembali yang cukup drastis pada belanja tanah, belanja bangunan dan gedung, belanja peralatan dan mesin, serta belanja jalan irigasi dan jaringan.

## 5. PENUTUP

### KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sudah sangat efektif terbukti selama periode tahun 2013-2016 empat tahun berturut-turut realisasi pendapatan selalu melebihi target.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2013-2016 sudah efisien dalam merealisasikan pendapatannya karena biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari capaian pendapatan itu sendiri.
- Pola hubungan kemandirian daerah Kabupaten Kebumen dalam empat tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan *instruktif* dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 11,78%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah.
- Berdasarkan kinerja belanja pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dapat dinilai belum optimal dalam keserasian belanja. Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan porsi belanjanya untuk belanja operasi dari pada belanja modal.
- Pertumbuhan pendapatan dalam APBD terjadi fluktuasi pendapatan dalam rentang waktu 2013-2016.

### SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah:

- Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan efisien dalam merealisasikan pendapatan daerah. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merealisasikan pendapatan daerah dapat di pertahankan atau kalau bisa ditingkatkan lagi agar kedepannya tidak ada penurunan efisien dalam kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen harus terus meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ketahun dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang sudah ada dan menggali potensi sumber daya lainnya contohnya dari sektor pariwisata, budaya, indutri kreatif

hingga perdagangan yang dimungkinkan bisa menambah PAD, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi semakin berkurang.

- Pemerintah Kabupaten Kebumen sebaiknya lebih proposional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni menekan belanja operasi dan meningkatkan belanja modal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur.2016.Akuntansi Keuangan Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2014.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Pemerintah*. 06 September 2016.
- Bastian, Indra.2006.*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*.Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul.2008.*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi.2013.*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.Edisi Empat.Salemba Empat. Jakarta.
- <http://www.Kebumenkab.go.id>
- Kusumadewi, Wahidah Niken.2016.Analisis Kinerja Pada Pemerintah Daerah Minahasa Utara Tahun 2012-2014.*Jurnal EMBA*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.
- Mahsun, M.2010.*Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua Cetakan Pertama*. BPFY-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Puspitasari, Ayu Febriyanti.2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2007 – 2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.
- Pramono, Joko.2014.Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Surakarta.*Jurnal STIEAMA*. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pramita, Puput Risky.2015.Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013.*Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. Di akses pada tanggal 31 Oktober 2017.
- Siregar, Baldric.2017.*Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah*.